

## **Peran Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Solusi: Penyusunan *Policy Brief* Rekomendatif Untuk Masalah Banjir di Desa Plangkapan Kabupaten Banyumas**

**Septiono Bangun Sugiharto<sup>1</sup>, Isna Darul Husni<sup>2</sup>, Beltsazar Ivan Sebastian<sup>3</sup>, Putri Elyne<sup>4</sup>, Nurhidayah<sup>5</sup>, Ravenska Ghinaa Amelia<sup>6</sup>, Ifat Fatmala<sup>7</sup>, Surya Dafa Pramudia<sup>8</sup>, Delya Morrassa Roesyadi<sup>9</sup>, Safiranti Nurhaliza<sup>10</sup>, Nasyifa Hanum Pramesti<sup>11</sup>, Nur Alfiah Rismawati<sup>12</sup>, Janu Satria Purwandaru<sup>13</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13</sup> Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Isna Darul Husni

**E-mail:** [husnidarul56@gmail.com](mailto:husnidarul56@gmail.com)

### **Abstrak**

Desa Plangkapan di Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, menghadapi risiko banjir dan kekeringan setiap tahun akibat topografi rendah, sistem drainase buruk, pintu air rusak, serta sedimentasi sungai. Hal tersebut menyebabkan banjir besar pada tahun 2022 yang merendam 75% wilayah desa. Sementara saat kemarau, warga kesulitan air bersih dan pertanian terganggu. Gubernur Jawa Tengah 2020 mengusulkan pembangunan embung tetapi belum terealisasi karena kendala lahan dan pendanaan. Tiga alternatif kebijakan ditawarkan: (1) pembangunan embung besar, ideal namun terkendala lahan dan biaya; (2) pembangunan embung kecil, yang lebih realistis dan cepat dilakukan; dan (3) revitalisasi 38 pintu air rusak sebagai bagian dari mitigasi banjir dan pengoptimalisasian irigasi. Dari ketiga alternatif, pembangunan embung berskala kecil menjadi opsi paling rasional dan strategis. Dengan dukungan masyarakat, perangkat desa, dan lahan seluas 1–1,5 hektare, serta dengan instansi-instansi terkait, embung ini dapat segera dibangun untuk menampung air hujan dan menyediakan cadangan air pada saat musim kemarau. Embung kecil berbiaya lebih rendah, mudah dirawat, dan menjadi solusi awal untuk meningkatkan ketahanan air dan ketangguhan desa terhadap bencana secara berkelanjutan. Terdapat juga beberapa tujuan dari kegiatan ini yakni meningkatkan ketahanan desa terhadap risiko banjir dan kekeringan melalui penyediaan infrastruktur air berskala kecil dalam hal ini embung. Selain itu, menyediakan sumber cadangan air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat, serta mendukung Pembangunan berkelanjutan desa dengan memperkuat kemandirian dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Metode dari kegiatan ini meliputi beberapa Langkah, mulai dari identifikasi lokasi strategis, membuat kajian teknis dan lingkungan, serta sistem pemeliharaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yakni terbangunnya embung berskala kecil sebagai sarana penyimpanan air hujan yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau, terwujudnya ketahanan desa secara sosial, ekonomi, dan ekologis, serta ketersediaan sumber air bersih yang lebih terjamin.

**Kata kunci** – kuliah kerja nyata, policy brief, banjir dan kekeringan, pembuatan embung, revitalisasi pintu air

### **Abstract**

The village of Plangkapan in Tambak District, Banyumas Regency, faces the risk of flooding and drought every year due to its low topography, poor drainage system, damaged floodgates, and river sedimentation. This led to major flooding in 2022, which submerged 75% of the village. During the dry season, residents struggle to access clean water and agriculture is disrupted. The Governor of Central Java in 2020 proposed the construction of a reservoir, but it has not been realized due to land and funding constraints. Three policy alternatives are offered:

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

(1) the construction of a large reservoir, which is ideal but constrained by land and cost; (2) the construction of a small reservoir, which is more realistic and can be implemented quickly; and (3) the revitalization of 38 damaged water gates as part of flood mitigation and irrigation optimization. Among the three alternatives, the construction of small-scale reservoirs is the most rational and strategic option. With community support, village officials, and land spanning 1–1.5 hectares, along with relevant agencies, this reservoir can be constructed promptly to store rainwater and provide a water reserve during the dry season. Small reservoirs are lower in cost, easier to maintain, and serve as an initial solution to enhance water resilience and the village's ability to withstand disasters sustainably. There are also several objectives of this activity, namely to increase the resilience of villages to the risks of flooding and drought through the provision of small-scale water infrastructure, in this case reservoirs. In addition, it provides a source of clean water that can be used by the community, and supports sustainable village development by strengthening community independence and resilience to disasters. The methods used in this activity include several steps, starting with identifying strategic locations, conducting technical and environmental assessments, and establishing a sustainable maintenance system. As a result, the expected outcomes of this initiative include the construction of small-scale reservoirs as rainwater storage facilities that can be utilized during the dry season, the achievement of social, economic, and ecological resilience for the village, and the availability of a more reliable source of clean water.

**Keywords** - fieldwork, policy brief, floods and droughts, reservoir construction, water gate revitalization

## **PENDAHULUAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum perguruan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menyebutkan bahwa Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Secara konkret KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun dan terlibat langsung dalam kehidupan bermasyarakat atau *learning by doing* yang akan berguna untuk mengembangkan *soft skills*, memperkuat karakter untuk menumbuhkan semangat kebangsaan atau cinta tanah air, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam mempersiapkan diri menghadapi kenyataan sosial, belajar bersama masyarakat, dan ikut memberdayakan masyarakat di tempat kegiatan. Selain itu, setiap aktivitas program KKN dipenuhi oleh semangat kolaborasi dan kerjasama antar mahasiswa dan antara mahasiswa dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mengatasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui ide dan pemikirannya, mahasiswa memiliki kekuatan untuk merubah pandangan fundamental yang berkembang dalam sebuah kelompok sehingga akan linear dengan kepentingan bersama. Mahasiswa merupakan salah satu faktor dalam perubahan sosial, di mana peran penting mahasiswa dalam masyarakat adalah sebagai *Agent of Change*, *Social Control* dan *Iron Stock* (Istichomaharani & Habibah, 2016). Dengan demikian, keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengkaji fenomena permasalahan sosial dan berusaha untuk mengatasinya dengan salah satu cara yakni menyusun rekomendasi kebijakan menjadi bagian penting dalam upaya pengabdian masyarakat.

Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama di berbagai daerah pedesaan, termasuk Desa Plangkapan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, adalah persoalan banjir. Fenomena banjir di desa tersebut kerap muncul saat musim hujan yang disebabkan oleh kombinasi antara tingginya tingkat curah hujan, rendahnya kapasitas sistem drainase, kerusakan ekosistem di kawasan aliran sungai, dan lemahnya pengelolaan lingkungan. Banjir sendiri merupakan luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau salju yang mencair atau dapat pula karena gelombang pasang yang membanjiri kebanyakan pada dataran banjir. Di tengah tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik dan solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berbasis kebijakan. Pandangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang

awalnya berfokus pada pengabdian masyarakat kini menjadi KKN berbasis solusi, sebuah pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada pemecahan masalah secara mendalam. Mengulas lebih jauh akan permasalahan banjir, intervensi kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur menjadi salah satu tuntutan yang harus segera direalisasikan. Kebijakan publik yang efektif harus didukung oleh data dan analisis yang kuat, serta melibatkan partisipasi publik. Dalam konteks ini, mahasiswa KKN memiliki peran krusial sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani kesenjangan antara realitas di lapangan dan perumusan kebijakan di tingkat pemerintah desa, daerah bahkan nasional. Mereka tidak hanya sekedar mengimplementasikan program, tetapi juga menganalisis masalah secara sistematis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang didukung oleh data empiris.

Salah satu langkah atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menyusun policy brief. Policy brief adalah ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditujukan untuk pemangku kebijakan mulai dari tingkat desa, daerah, dan bahkan sampai tingkat nasional. Pengidentifikasian isu-isu, serta membuat pilihan kebijakan, bukti-bukti terbaru dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang menjadi beberapa hal yang penting dan utama untuk digali, juga hal ini ditujukan untuk menentukan instansi yang sekiranya relevan (Heryana, 2020). Ringkasan kebijakan atau policy brief ini berfokus pada pemberian argumen untuk meyakinkan sang pembuat kebijakan atau instansi terkait tentang pentingnya masalah yang ada saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternatif yang dipilih, dan kemudian mendorong untuk bertindak. Dalam hal ini, diharapkan hasil penelitian yang ada dapat menginformasikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah untuk memulai kebijakan yang lebih efektif.

## **METODE**

Pembuatan Policy Brief ini mengaplikasikan beberapa metode yang digunakan yakni identifikasi lokasi strategis dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait untuk menentukan lahan potensial seluas 1 – 1,5 hektare. Selanjutnya membuat kajian teknis dan lingkungan guna memastikan kesesuaian lokasi dari berbagai aspek, seperti hidrologi, kontur tanah, dan dampak ekologi. Terakhir menerapkan sistem pemeliharaan berkelanjutan melalui pembentukan kelompok masyarakat pengelola embung untuk memastikan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan objek wisata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Permasalahan Banjir Di Desa Plangkapan Kabupaten Banyumas**

Desa Plangkapan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas memiliki luas sebesar 2,40 km<sup>2</sup> dan merupakan daerah cekungan di wilayah Banyumas. Secara administratif, wilayah Desa Plangkapan dibatasi oleh Desa Gumelar Lor di bagian utara, Desa Gumelar Kidul di bagian timur, Desa Nusadadi di bagian selatan, dan Kelurahan Sumpiuh di bagian barat. Dilihat dari kondisi topografinya, Desa Plangkapan memiliki ketinggian di bawah permukaan laut yang menyebabkan desa tersebut sangat rentan terhadap genangan air terutama saat musim hujan berlangsung.

Banjir di Kecamatan Tambak khususnya Desa Plangkapan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar dikarenakan pada tahun 2022 sekitar 75% wilayah di desa tersebut mengalami banjir yang cukup parah yang menyebabkan ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian yang bervariasi dengan rata-rata 60 cm dan berlangsung kurang lebih selama satu bulan. Banjir yang serupa kembali terjadi pada tahun 2024 dengan intensitas yang tidak kalah parah dan kembali merendam sebagian besar wilayah desa. Terdapat beberapa penyebab terjadinya banjir di Desa Plangkapan, diantaranya adalah curah hujan yang tinggi, masalah drainase, permukaan tanah yang rendah, kondisi infrastruktur pengaliran yang ada mengalami kerusakan, serta meluapnya aliran sungai Kali Gatel dan

Kali Ijo. Menurut Prasetyo & Sudrajat (2021) curah hujan yang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir yang berada di wilayah deliniasi, hal ini dapat terjadi dikarenakan Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang dimana pada saat musim hujan datang akan menyebabkan curah hujan yang tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir yang terjadi di Desa Plangkapan. Selain masalah banjir, Desa Plangkapan juga mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Untuk menangani masalah - masalah tersebut maka disarankan pembuatan embung di sekitar daerah yang rawan banjir. Pembuatan embung merupakan salah satu solusi jangka panjang yang dapat dilakukan untuk daerah yang rawan banjir. Embung berfungsi dengan cara menampung air hujan dan menyimpannya sehingga air tersebut dapat digunakan saat dibutuhkan. atau daerah yang memiliki ketinggian banjir yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain. dari pembuatan embung ini juga membantu warga sekitar saat kekeringan terjadi di musim kemarau. Selain curah hujan yang tinggi, terdapat permasalahan pada sistem drainase di Desa Plangkapan yang dimana menjadi faktor utama terjadinya banjir. Sistem drainase di Desa Plangkapan kapasitasnya tergolong kurang memadai untuk menampung dan mengalirkan air hujan dalam jumlah besar. Selain itu, penumpukan sedimentasi seperti lumpur dan pasir di dasar saluran juga menjadi salah satu faktor kerusakan pada sistem drainase yang menyebabkan mengecilnya daya tampung air dan menghambat aliran air sehingga wilayah tersebut rentan terhadap bencana banjir. Untuk memperbaiki sistem drainase yang mengalami kerusakan diperlukan upaya salah satunya normalisasi melalui pengerukan sedimentasi di wilayah yang terdampak. Dan salah satu faktor lainnya itu kerusakan infrastruktur pengairan di beberapa wilayah yang memerlukan perhatian dari aparat daerah untuk diperbaiki sehingga dapat mengurangi bencana banjir.



**Gambar 1.**  
Banjir di Desa Plangkapan pada tahun 2022

### **Peran Mahasiswa KKN Dalam Pengabdian Berbasis Solusi**

Mahasiswa KKN di Desa Plangkapan, Kabupaten Banyumas berperan aktif dalam merencanakan dan menyusun pembuatan Policy Brief guna mendukung terciptanya solusi dari permasalahan banjir di Desa Plangkapan, Kabupaten Banyumas. Harapannya agar Policy Brief ini dapat menjadi stimulus atau langkah awal bagi para pembuat kebijakan mendengar dan merealisasikan aspirasi yang diajukan. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk memahami masalah masyarakat secara kontekstual dan memiliki kemampuan untuk pemecahan data dan partisipasi lokal. Oleh karena itu, KKN berbasis solusi menuntut mahasiswa untuk tidak hanya mengamati, tetapi juga menganalisis masalah dan membuat solusi praktis untuk perbaikan. KKN merupakan media pembelajaran yang menekankan integrasi antara pengetahuan akademik dan realitas sosial. Dalam

konteks penanggulangan bencana seperti banjir, mahasiswa KKN memiliki peran strategis sebagai jembatan antara warga dan pemerintah desa. Selain itu, pengabdian masyarakat yang efektif harus berbasis pada pemetaan masalah, perencanaan kolaboratif, dan monitoring dampak.

Secara umum, peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat berbasis solusi mencakup:

1. Mengidentifikasi masalah prioritas: Para Mahasiswa melakukan pemetaan sosial dan lingkungan dengan pendekatan partisipatif dan metode ilmiah
2. Perumusan solusi Inovatif: Menyusun program kerja yang tidak hanya seremonial saja, akan tetapi menasar pada kebutuhan nyata masyarakat
3. Penyusunan Policy Brief: Mengembangkan dokumen rekomendatif berbasis data untuk diserahkan kepada pemerintahan desa.



**Gambar 2.**

Diskusi bersama Kepala Desa Plangkapan mengenai Policy Brief

### **Rekomendasi Dan Implementasi Policy Brief Sebagai Solusi Kebijakan**

Policy Brief merupakan salah satu instrumen penting dalam proses advokasi dan perumusan suatu kebijakan publik. Policy Brief disusun secara ringkas, terstruktur, dan dengan data-data valid yang ditemukan, sehingga dapat membantu pemangku kebijakan memahami akan permasalahan, isu, alternatif kebijakan, serta rekomendasi kebijakan yang akan diimplementasikan nantinya (Irawati dkk, 2017). Jika dihubungkan dengan konteks KKN, penyusunan Policy Brief menjadi suatu bentuk konkret kontribusi mahasiswa melalui pemikirannya dalam mendorong transformasi kebijakan di tingkat desa, terkhusus pada Desa Plangkapan, Kabupaten Banyumas. Dalam menyusun Policy Brief ini, kelompok mahasiswa KKN Unsoed Desa Plangkapan menjalankan salah satu fungsi dari Policy Brief, terkhusus pada fungsi sebagai pihak yang menjembatani masyarakat dan perangkat desa setempat dengan pemangku atau pembuat kebijakan. Fungsi utama sebagai jembatan tersebut yakni berupaya menganalisis, menjelaskan, dan meyakinkan isu atau permasalahan yang ada berdasarkan data-data relevan, serta menyusun dan menyajikan rekomendasi kebijakan yang mendukung.

Berdasarkan hasil kajian menggunakan metode studi pustaka (library research), tersusun beberapa rekomendasi yang dirumuskan dalam Policy Brief terkait banjir di Desa Plangkapan, Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

1. Pembuatan Embung Berskala Besar

Pembuatan embung berskala besar menjadi salah satu alternatif kebijakan yang dapat dijadikan pilihan, hal ini karena bertujuan sebagai sarana penampungan air hujan dan sebagai

cadangan air saat musim kemarau berlangsung. Diperlukan kebijakan yang mendorong percepatan negosiasi atau kolaboratif akan penggunaan lahan dengan masyarakat setempat, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pengalokasian dan pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber untuk memecahkan permasalahan tersebut.

2. Pembuatan Embung Berskala Kecil

Pembuatan embung berskala kecil menjadi langkah baru atau alternatif kebijakan jika pembuatan embung berskala besar mengalami stagnasi, utamanya terkait dengan ketersediaan lahan dan anggaran. Embung berskala besar idealnya membutuhkan lahan seluas 3 hektare dan anggaran sekitar Rp17 Miliar, namun saat ini hanya tersedia lahan seluas 1,5 hektare dengan dana sekitar Rp5 Miliar berdasarkan data relevan yang didapatkan dari perangkat desa setempat. Dengan demikian, pembangunan embung berskala kecil menjadi alternatif kebijakan dan langkah strategis yang dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan penyediaan cadangan air pada saat musim kemarau. Lahan yang tersedia sudah sesuai dengan kriteria berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa yakni tampungan 500 m<sup>3</sup> - 3000 m<sup>3</sup>. Kolam embung mempunyai tinggi maksimum 3 m (dari dasar sampai puncak tanggul) Embung kecil yang terdapat dalam klasifikasi diatas adalah yang dimaksud pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018.

3. Revitalisasi Pintu Air

Selain Pembuatan embung berskala besar dan embung berskala kecil, pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait, seperti dinas PUPR dan dinas PSDA, perlu menetapkan program revitalisasi pintu-pintu air di wilayah Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sumpiuh. Pintu air di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sumpiuh berjumlah 48-unit dan hanya 10-unit yang berfungsi dengan baik, sementara 38 pintu air lainnya mengalami kerusakan dan tidak dapat beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut memperburuk risiko banjir, terutama saat debit air meningkat drastis pada musim penghujan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan alokasi anggaran khusus untuk mengembalikan fungsi (revitalisasi) pengairan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD kabupaten, dan berkolaborasi dengan program nasional terkait ketahanan air dan pengendalian banjir. Revitalisasi pintu air juga mendukung keberlanjutan sistem irigasi pertanian dan ketahanan pangan desa.



**Gambar 3.**

Contoh Embung Besar Watuagung dan Embung Kecil Prembun



**Gambar 4.**

Beberapa Pintu Air di daerah Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas

## KESIMPULAN

Masalah banjir yang melanda Desa Plangkapan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas adalah isu kompleks yang memerlukan penanganan dari berbagai sektor, multidisipliner, dan berkelanjutan. Ciri-ciri daerah dataran rendah, intensitas hujan yang tinggi, ketidakcukupan kapasitas drainase, serta kerusakan infrastruktur irigasi adalah faktor-faktor utama penyebab banjir berulang yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak hanya sekadar pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana keterlibatan intelektual dalam merancang solusi yang berbasis kebijakan melalui metode ilmiah. Mahasiswa KKN memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat mengaitkan hasil penelitian akademis dengan kondisi sosial di masyarakat. Melalui metode studi pustaka, mahasiswa merumuskan policy brief sebagai alat advokasi kebijakan yang dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan penyusunan kebijakan publik yang tepat, responsif, dan berbasis data.

Rekomendasi kebijakan yang terdapat dalam policy brief, seperti pembangunan embung besar dan kecil, serta revitalisasi pintu air, merupakan solusi nyata yang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir serta meningkatkan ketahanan air dan pangan masyarakat desa. Ketiga opsi kebijakan ini menampilkan pendekatan yang terorganisir, memperhatikan faktor teknis, sosial, dan sumber daya yang ada. Sinergi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah desa melalui pembuatan policy brief merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun pengelolaan penanggulangan bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Peran mahasiswa KKN dalam mendorong perubahan kebijakan melalui pemikiran kritis dan solusi inovatif adalah kontribusi nyata bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam aspek pengabdian kepada Masyarakat

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan secara mendalam kepada masyarakat Desa Plangkapan terkhusus kepada Bapak Kepala Desa Plangkapan dan seluruh perangkat desa yang telah membantu dan mendukung secara penuh. Terkait program-program yang telah kami rancang dan siapkan agar semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan berkontribusi langsung kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Aman Suroso sebagai ketua dusun satu di Desa Plangkapan dan bapak Rakhmawan Hidayat sebagai ketua dusun dua di Desa Plangkapan yang telah bersedia memberikan informasi mengenai kondisi dan data-data yang relevan di setiap lingkungan desa. Juga kepada Bapak Septiono Bangun Sugiharto, S.KM., M.P.H yang kami hormati sebagai dosen

pembimbing lapangan yang telah mendampingi kami dengan tulus, sehingga kami dapat menyelesaikan program kerja KKN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2024). *Kecamatan Tambak dalam angka 2024*. Diakses dari: <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2024/09/26/2c263d5b11fcd48e6fac41d6/kecamatan-tambak-dalam-angka-2024.html>
- Budiharso, A. S., & Momongan, A. J. 2023. Kajian *Topographic Wetness Index (TWI)* untuk mengetahui potensi bahaya banjir di Kota Manado. *Journal Geological Processes, Risks, and Integrated Spatial Modeling*, 1(01): 1-11.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. 2024. Data dan informasi Kabupaten Banyumas 2024. In D.K. dan I.K. Banyumas (Ed.), *Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Banyumas* (Vol. 8). CV. Fuji Putra.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. 2025. Data dan informasi Kabupaten Banyumas 2025. In D. K. dan I. K. Banyumas (Ed.), *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas* (Vol. 9). CV. Novalindo.
- Heryana, A. (2020). *Policy Brief: Pengertian, Fungsi, dan Efektivitas*. Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Humas Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Gubernur Ganjar naik perahu ke Desa Terisolir akibat banjir*. Diakses dari: [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=4694](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4694)
- Irawati, et al. (2017). Modul Pelatihan Lanjutan Analisis Kebijakan. Lembaga Administrasi Negara RI
- Istichomaharani, I. S., & Habibah, S. S. (2016). Mewujudkan peran mahasiswa sebagai “agent of chane, social control, dan iron stock”. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Paper Ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Kreatif Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN” (2016), 2-7.
- Miardini, A., & Saragih, G. S. 2019. Penentuan prioritas penanganan banjir genangan berdasarkan tingkat kerawanan menggunakan *Topographic Wetness Index*: Studi kasus di DAS Solo. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1): 113-119.
- Prasetyo, A. D., & Sudrajat, A. S. E. (2021). Identifikasi Bencana Banjir Kelurahan Tlogosari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Pondasi*, 26(2), 94-100.